

# **EKSTERNALITAS BANYUWANGI FESTIVAL (B-FEST) DI KABUPATEN BANYUWANGI**

Studi Kasus:

Pantai Boom, Kelurahan Kampung Mandar di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

Oleh:

Naylal Fithri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Brawijaya

Tlp:08231737487

Email: [nayla.fithri@gmail.com](mailto:nayla.fithri@gmail.com)

Dr. Susilo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Brawijaya

Tlp:0811369482

Email: [susilo@ub.ac.id](mailto:susilo@ub.ac.id)

Dias Satria, Ph.D.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Brawijaya

Tlp:081333828319

Email: [dias.satria@gmail.com](mailto:dias.satria@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat mendorong sumber pendapatan daerah. Saat ini keanekaragaman budaya memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Banyuwangi berkolaborasi dengan kreativitas budaya, teknologi dan pariwisata dengan inovasi baru melalui Banyuwangi festival (B-fest). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksternalitas B-Fest Pantai Boom dengan adanya event pada aspek lingkungan, sosial dan ekonomi di Banyuwangi. Penelitian ini dilakukan melalui survei dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang digunakan dalam pengambilan keputusan terhadap eksternalitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian eksternalitas dalam aspek lingkungan lebih penting dari pada aspek sosial dan ekonomi. Sebagaimana diperlukan dalam menangani eksternalitas negatif yakni keterlibatan ketiga aktor yang meliputi pemerintah, masyarakat dan swasta dengan fungsi masing-masing yang sangat dibutuhkan satu sama lain dalam mendorong publik untuk bersama-sama mengembangkan kawasan. Diharapkan eksternalitas negatif yang muncul yaitu banyaknya sampah yang ada dapat dikurangi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah maupun masyarakat di Banyuwangi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

**Kata Kunci:** Eksternalitas Lingkungan, sosial dan ekonomi, Banyuwangi Festival.

## ABSTRACT

*The tourism sector is one sector that can encourage local revenue sources. Today cultural diversity has a separate appeal for society. Banyuwangi collaborates with creativity, technology and tourism with new innovations through Banyuwangi festival (B-fest). This study aims to determine the externalities of the Boom Beach B-Fest with the occurrence of environmental, social and economic aspects in Banyuwangi. This research was conducted through the method of Analytical Hierarchy Process (AHP) in making decisions about externalities. The results of this study indicate that conducting externalities in environmental aspects is more important than social and economic aspects. It is necessary to deal with negative externalities which are the responsibility of the government, society and private sector by using each one that is very important to jointly develop the region. It is expected that the negative externalities that arise, namely the amount of waste that can be reduced and provide greater benefits for the region and society in Banyuwangi to realize good governance.*

**Keywords:** *Environmental Externalities, social and economic, Banyuwangi Festival, Sustainable Tourism.*

## PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor industri terbesar di dunia. Saat ini pariwisata adalah komponen utama dari sebagian besar perekonomian yang berkembang pesat melalui industri online. Melalui metode pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas yang disebut *Community Based Tourism (CBT)* telah terbukti mendorong pembangunan daerah di negara berkembang khususnya di daerah pedesaan miskin. Pada saat yang sama, teknologi informasi dan komunikasi sedang digunakan dan mulai menunjukkan potensi untuk mendorong pembangunan daerah (Vogel, 2014). Sektor Pariwisata menjadi sektor yang terus mengalami inovasi, dimana pola pikir masyarakat setempat harus bisa melihat peluang terhadap potensi wisata yang ada.

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan sebuah tempat pariwisata, diantaranya; wisatawan, obyek wisata, transportasi, fasilitas pelayanan serta informasi dan promosi. Misalnya saja dari segi promosi, yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk dan mengingatkan calon wisatawan dengan tujuan meningkatkan jumlah wisatawan serta lama tinggal wisatawan yang berkunjung. Upaya pengembangan pariwisata dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat sekitar obyek wisata. Pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat ternyata mempunyai dampak terhadap lingkungan sekitar baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Saat ini kepedulian masyarakat terhadap budaya, seni, festival dan hal-hal yang berkaitan dengan tradisi semakin meningkat. Perlu adanya inovasi baru terutama dalam hal festival yang ada dengan mengemas keunikan budaya-budaya lokal melalui festival akan semakin menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Okech (2011) dalam tulisannya mengungkapkan bahwa adanya alasan yang membuat festival menjadi sarana yang populer untuk mempromosikan pariwisata. Pertama, festival meningkatkan jumlah wisatawan yang datang terutama masyarakat lokal; kedua, kesuksesan festival dapat menciptakan kembali *image* dari suatu daerah; ketiga, festival membuat daerah yang awalnya tidak terkenal menjadi lebih dikenal sebagai salah satu destinasi wisata.

Dengan diadakannya penyelenggaraan Banyuwangi festival, diharapkan dapat memberikan dampak perekonomian bagi Kabupaten Banyuwangi untuk memaksimalkan potensi daerah dan memberikan semangat kepada masyarakat dalam membangun daerah. Kehadiran wisatawan tentunya akan menciptakan peluang bisnis bagi penduduk lokal. Disisi lain, suatu *event* yang digelar pada tempat wisata apabila tidak direncanakan dengan baik akan menyebabkan kerusakan lingkungan fisik dan menimbulkan ketidaknyamanan penduduk

sekitar terhadap wisatawan maupun obyek wisata. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengelola tempat wisata tersebut. Sehingga dalam pengelolaan pariwisata harus mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal.

Pemerintah daerah setempat menginginkan adanya dampak ekonomi yang terjadi dari terselenggaranya Banyuwangi Festival, sehingga penelitian ini fokus pada dampak lain yang terjadi khususnya di Pantai Boom dari aspek lingkungan, sosial dan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi ini dikarenakan, Pantai Boom merupakan salah satu pantai yang selalu ikut serta dalam event Banyuwangi Festival. Banyuwangi Festival merupakan *event based and local cultural heritage*, dimana setiap daerah yang ada di Kabupaten Banyuwangi harus berpartisipasi dengan budaya dan ciri khas masing-masing daerah. Dengan latarbelakang masalah yang ada, menjadi menarik untuk membahas bagaimana eksternalitas Banyuwangi Festival khususnya di Pantai Boom mempengaruhi aspek lingkungan, sosial dan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Juga dibahas penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam proses pengelolaan wisata berkelanjutan di Pantai Boom.

## **KONSEP EKSTERNALITAS**

Eksternalitas adalah dampak tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi orang lain. Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari satu pihak yang mempunyai pengaruh terhadap pihak lain dan tidak ada kompensasi yang bayar oleh pihak yang menyebabkan atau kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak dan keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar. Ada dua syarat terjadinya eksternalitas yakni adanya pengaruh dari suatu tindakan dan tidak ada kompensasi yang dibayarkan atau diterima. Eksternalitas yang memberikan keuntungan kepada pihak lain disebut eksternalitas positif. Sebaliknya tindakan yang mengakibatkan kerugian pihak lainnya disebut eksternalitas negatif.

Mangkoesubroto (1997), menjelaskan macam-macam eksternalitas ditinjau dari segi dampaknya dibagi menjadi dua. Yaitu:

- 1) Eksternalitas positif, adalah tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan didalam pasar. Jika kegiatan dari beberapa orang menghasilkan manfaat bagi orang lain dan orang yang menerima manfaat tersebut tidak membayar atau memberikan harga atas manfaat tersebut maka nilai sebenarnya dari kegiatan tersebut tidak tercermin dalam kegiatan pasar.

- 2) Eksteranalitas Negatif, adalah biaya yang dikenakan pada orang lain diluar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif.

Eksternalitas juga dapat mempengaruhi efisiensi ekonomi yang memiliki keterkaitan. Keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar adalah apa yang disebut dengan eksternalitas. Secara umum dapat dikatakan bahwa eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan. Berikut jenis-jenis eksternalitas yang dapat terjadi dalam interaksi ekonomi, antara lain:

- 1) Dampak suatu produsen terhadap produsen lain

Suatu kegiatan produksi dikatakan mempunyai dampak eksternal terhadap produsen lain jika kegiatan itu mengakibatkan terjadinya perubahan atau pergeseran fungsi produksi dari produsen lain.

- 2) Dampak produsen terhadap konsumen

Suatu produsen dikatakan mempunyai efek eksternal terhadap konsumen, jika aktivitasnya merubah atau menggeser fungsi utilitas konsumen.

- 3) Dampak konsumen terhadap konsumen lain

Terjadi jika aktivitas seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi fungsi utilitas konsumen yang lain. Konsumen bisa dipengaruhi tidak hanya oleh efek samping dari kegiatan suatu konsumen yang lain dapat terjadi dalam berbagai bentuk.

- 4) Dampak konsumen terhadap produsen

Dampak konsumen terhadap produsen terjadi jika aktivitas konsumen mengganggu fungsi produksi suatu produsen atau kelompok produsen tertentu.

Meningkatnya manfaat perdagangan dan adanya persaingan yang semakin intensif dapat menaikkan tingkat efisiensi kawasan. Implikasi penting dengan semakin meningkatkan volume kegiatan ekonomi masyarakat yakni semakin bertambahnya persoalan yang terkait dengan kelestarian alam dan lingkungan. Kecenderungan pasar terhadap meningkatnya permintaan wisata alam antara lain disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan kualitas lingkungan yang baik. Padahal kondisi lingkungan alam banyak yang mengalami kerusakan karena berbagai sebab, sehingga tempat-tempat wisata dengan suasana yang alami banyak dikunjungi wisatawan. Hal ini kemudian membangkitkan semangat untuk mengembangkan objek-objek wisata alam di berbagai daerah. Sebagaimana diketahui aspek

alam dan lingkungan merupakan faktor penting dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Adanya aktivitas ekonomi yang dilakukan diharapkan memiliki eksternalitas positif, sehingga dapat memberikan dampak bagi pemerintah daerah dan peningkatan taraf hidup masyarakat senantiasa menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh semakin banyaknya barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat menyebabkan pencemaran udara, air dan darat. Dalam hal eksternalitas negatif misalnya, hal yang dilakukan untuk mengatasinya yakni Pemerintah mengenakan pajak pada penyebab polusi sampai polusi yang ditimbulkan mencapai nol. Asumsi kebijakan ini adalah suatu anggapan bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan bersih.

Eksternalitas dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Sehingga secara umum adanya eksternalitas akan dapat membuahkan suatu efisiensi masyarakat apabila ada keterhubungan yakni dengan mengembangkan yang positif dan memperbaiki yang negatif. Untuk itu perlu adanya suatu upaya untuk menanggulangnya, diantaranya adalah Teori Coase mengenai hak kepemilikan karena dengan tegasnya kepemilikan maka mekanisme pasar akan baik sehingga tercapai sumber ekonomi yang efisien. Selain itu, cara yang dapat dilakukan pemerintah adalah pemberian pajak dan subsidi.

Menurut Nuryatni (1995), untuk mewujudkan pengembangan wisata yang berkelanjutan perlu persyaratan konseptual sebagai berikut: berpijak pada keseimbangan antara aspek pelestarian dan pengembangan serta berorientasi kedepan (jangka panjang); penekanan pada nilai manfaat yang besar bagi masyarakat setempat; prinsip pengelolaan sumberdaya yang tidak merusak dan berkelanjutan untuk jangka panjang, baik secara sosial, budaya, ekonomi maupun ekologi; ada keselarasan sinergis antara kebutuhan wisatawan, lingkungan hidup dan masyarakat lokal; mampu mengembangkan apresiasi yang lebih peka dari masyarakat terhadap warisan budaya dan lingkungan alam.

### **PARIWISATA BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE TOURISM*)**

Ketika membahas sejarah konsep pariwisata berkelanjutan, perlu dicatat bahwa adanya tantangan lingkungan yang berkaitan dengan industri pariwisata dimana tidak dibahas sama sekali di Laporan Komisi Dunia PBB tahun 1987. Rencana aksi PBB untuk pembangunan berkelanjutan Agenda 21 yang diadopsi pada Konferensi Rio pada tahun 1992 mencakup total 40 topik yang berbeda dan 115 program. Namun, terlepas dari luasnya tematik dan ambisi untuk memasukkan semua kelompok dalam masyarakat, industri pariwisata hanya ditampilkan dalam beberapa referensi singkat tentang ekowisata sebagai alat untuk mempromosikan pengembangan berkelanjutan (Aall, 2014).

Meskipun sedikit perhatian yang diberikan kepadanya, pariwisata adalah sektor pertama yang mengikuti rekomendasi Agenda 21 bahwa semua sektor komersial harus mengembangkan sektor mereka yang spesifik versi Agenda 21 di tingkat internasional. Pada tahun 1996, Agenda 21 yang terpisah untuk pariwisata adalah diterbitkan. Rencana ini dikembangkan dalam kemitraan dengan *World Travel & Tourism Council (WTTC)*, *World Tourism Organization (WTO)* dan *Earth Council (EC)* yang mana dibentuk dari kolektif internasional LSM yang dibentuk untuk menindaklanjuti rekomendasi Konferensi Rio dengan tujuan untuk mendirikan sistem dan prosedur di tingkat internasional yang menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai inti pertimbangan dalam semua keputusan dalam industri pariwisata, mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat pariwisata berkelanjutan dan untuk menyatakan bahwa pengaturan diri adalah strategi yang paling efektif untuk terapkan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pariwisata.

*Sustainable Tourism* adalah pariwisata yang berkembang pesat, termasuk pertambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan, dimana perkembangan pariwisata dan investasi-investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk serta dapat menyatu dengan lingkungan. Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi isu lain yang lebih luas. Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu solusi tepat dalam penanganan lingkungan, dimana ketika masyarakat sadar akan pentingnya menjaga lingkungan disekitar maka masyarakat akan merasakan manfaat lebih yang diterima dari upaya pelestarian lingkungan tersebut.

Beberapa pokok pikiran tentang interpretasi pembangunan pariwisata berkelanjutan, yaitu : 1) pembangunan pariwisata berkelanjutan harus mampu mengatasi permasalahan sampah lingkungan serta memiliki perspektif ekologis, 2) pembangunan pariwisata berkelanjutan menunjukkan keberpihakannya pada pembangunan berskala kecil dan yang berbasis masyarakat lokal/setempat, 3) pembangunan pariwisata berkelanjutan menempatkan daerah tujuan wisata sebagai penerima manfaat dari pariwisata, untuk mencapainya tidak harus dengan mengeksploitasi daerah setempat, 4) pembangunan pariwisata berkelanjutan menekankan pada keberlanjutan budaya, dalam hal ini berkaitan dengan upaya-upaya membangun dan mempertahankan bangunan tradisional dan peninggalan budaya di daerah tujuan wisata (Aronsson, 2000).

Masyarakat dalam lingkungan suatu obyek wisata memiliki peran yang penting, karena masyarakat memiliki budaya yang dapat menjadi daya tarik wisata, dukungan masyarakat

terhadap tempat wisata berupa sarana dan prasarana, dan tenaga kerja yang memadai. Peran ini diperlukan oleh pihak pengelola obyek wisata untuk menunjang keberlangsungan obyek wisata serta membuat kehidupan masyarakat sekitar menjadi lebih baik. Keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak lepas dari pemerintahan yang baik yang meliputi tiga aktor yakni masyarakat, swasta dan pemerintah.

*Good governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil secara efisien dan merata. Dalam penyelenggaraan pemerintahan ada 3 unsur yang harus dipenuhi yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Menurut Kolondam (1999), Ada beberapa prinsip *good governance*, yaitu :

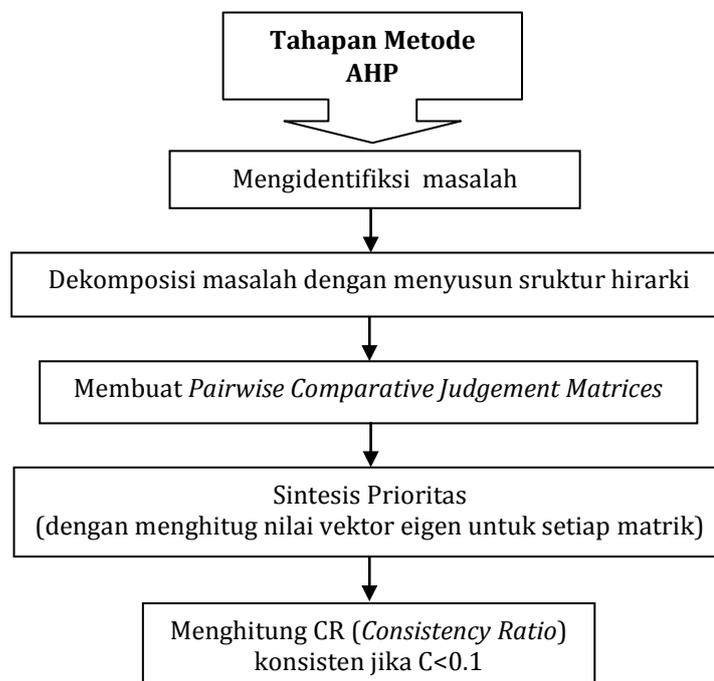
1. partisipasi
2. kepastian hukum
3. transparansi
4. tanggung jawab
5. berorientasi pada kesepakatan
6. keadilan
7. efektifitas dan efisiensi
8. akuntabilitas, dan
9. visi strategik

Prinsip-prinsip itulah yang melekat pada sebuah pemerintahan dalam rangka mencapai apa yang diharapkan sehingga adanya hubungan yang baik dengan masyarakat dapat dirasakan. Pemerintah tentunya dari sejak dahulu kala telah menjalankan ataupun merencanakan program-program dalam rangka adanya pembangunan nasional baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sebuah situasi dimana keterlibatan ketiga aktor yang meliputi pemerintah, masyarakat dan swasta dengan fungsi masing-masing yang sangat dibutuhkan satu sama lain dalam mendorong publik untuk bersama-sama mengembangkan pariwisata yang ada. Hal ini juga menghasilkan sebuah kesepakatan kerjasama antara para pihak yang terkait dengan menjamin dan memperjelas fungsi, hak serta kewajiban masing-masing pihak dalam sistem pengelolaan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Pantai Boom, Kelurahan Kampung Mandar di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada bulan Agustus 2018. Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus untuk mengetahui gambaran tujuan penelitian.

Penelitian kualitatif menurut Creswell (2014) adalah sarana untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial atau manusia. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara survey, wawancara dan *Focus Grup Discussion* (FGD) ke berbagai sumber Sebanyak 35 (tiga puluh lima) responden diantaranya adalah Bappeda, dinas pariwisata, pemilik UMKM, pemilik *Guest house*, masyarakat penyelenggara festival, masyarakat sekitar pantai Boom, pakar ekonomi dan pelaku seni. Model analisis data menggunakan *Analitycal Hierarchy Process (AHP)*. *Analitycal Hierarchy Process* adalah suatu metode pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria pilihan dan juga perbandingan berpasangan antara pilihan yang ada. Permasalahan pengambilan keputusan dengan AHP umumnya dikomposisikan menjadi kriteria, dan alternative pilihan. Secara garis besar prosedur AHP meliputi tahapan sebagai berikut:



Dari tahapan langkah AHP diatas, dapat dijelaskan bahwa; Pertama, mendefinisikan masalah atau tentukan tujuan utama (tentukan apa yang hendak diraih). Kedua setelah persoalan didefinisikan, maka dilakukan decomposition yaitu memecah persoalan yang disebut hirarki. Ketiga, *Comparative Judgement* dimana prinsip ini dilakukan dengan membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat diatasnya, penilaian berpebgaruh terhadap prioritas dari elemen-elemen yang ada, hasil dari penilaia dituliskan dalam mariks *pairwise comparison*. Keempat, *Synthesis of Priority* dengan mengitug nilai vektor eigen pada matrik yang sudah dibuat. Kelima, *Logical Consistency* disini responden harus memiliki konsistensi dalam melakukan perbandingan elemen dan hasil penilaian yang dapat diterima mempunyai  $CR < 0,1$ .

## HASIL

Saat ini kegiatan pariwisata semakin berkembang pesat, dimana terdapat dampak positif dan negatif bagi suatu daerah. Pariwisata kini sudah menjadi sebuah industri dan memiliki dampak yang signifikan. Industri pariwisata membawa banyak investasi yang dibutuhkan ke suatu daerah yang dapat membantu untuk melestarikan budaya dan kearifan masyarakat setempat. Pembangunan pariwisata harus memperhatikan dampak lingkungan dalam kegiatan pembangunan suatu objek wisata. Pembangunan objek wisata yang mengakibatkan rusaknya lingkungan harus dihentikan pembangunannya. Pembangunan objek wisata bukanlah untuk merusak lingkungan tetapi sekedar memanfaatkan sumber daya alam untuk kebaikan manusia dan meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga menjadi keseimbangan, keselarasan dan keserasian (Suwanto, 1997).

Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi eksternalitas yang muncul di Pantai Boom. Kemudian dilakukan olah data menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* dengan hasil pengolahan data yakni menggabungkan penilaian responden terhadap tingkat kepentingan relative setiap kriteria, subkriteria dan menghitung bobot yang merupakan prioritas untuk setiap kriteria dan subkriteria dengan rasio inkonsistensinya.

Berikut adalah Matrik perbandingan berpasangan untuk kriteria utama.

Tabel 1.1 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria

Kriteria	Ekonomi	Lingkungan	Sosial
Ekonomi	1,0	0,2	0,5
Lingkungan	5,0	1,0	1,0
Sosial	2,0	1,0	1,0

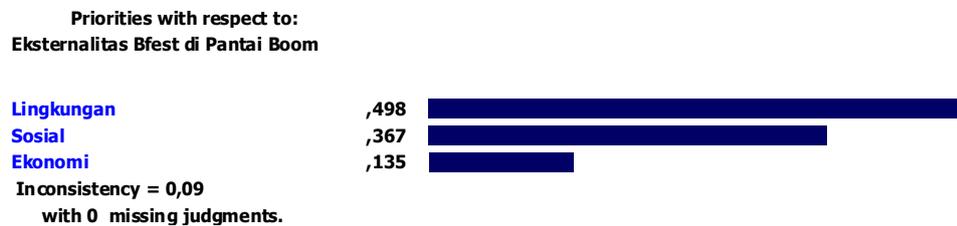
Dari perbandingan berpasangan diatas dapat dihitung prioritas dari masing-masing kriteria berdasarkan kontribusinya terhadap tujuan. Yakni dengan membagi setiap elemen dari matriks dengan jumlah total kolomnya, kemudian meratakan elemen disetiap barisnya sehingga diperoleh bobot masing-masing kriteria. Sehingga bobot kriteria ini yang akan digunakan untuk menilai prioritas dari setiap kriteria.

Berikut adalah prioritas setiap kriteria pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Prioritas Kriteria

Kriteria	Ekonomi	Lingkungan	Sosial	Prioritas Vektor (PV)
Ekonomi	0,1	0,1	0,2	0,14
Lingkungan	0,6	0,5	0,4	0,49
Sosial	0,3	0,5	0,4	0,37

Dari bobot kriteria diatas terlihat bahwa lingkungan menjadi kriteria dengan prioritas tertinggi sebesar (0,49) dilanjut dengan sosial sebesar (0,37) dan ekonomi sebesar (0,14). Berikut bobot urutan prioritas kriteria dalam bentuk grafik dapat dilihat pada gambar 6.1 berikut ini.



Gambar 1.1 Bobot prioritas kriteria

Karena rasio konsistensinya lebih kecil dari 0,1 ( $CR < 0,1$ ) yakni sebesar 0,09 maka perbandingan berpasangan tersebut konsisten atau dapat diterima. Sehingga dapat dijelaskan bahwa lingkungan adalah salah satu tempat bagi makhluk hidup yang ada di bumi untuk melakukan kegiatannya, baik untuk memenuhi kebutuhan, berkembang biak ataupun berinteraksi dengan orang lain. Pariwisata akan mendatangkan manfaat bagi lingkungan karena sebuah objek wisata apabila ingin banyak mendapatkan kunjungan dari wisatawan haruslah terjaga kebersihannya sehingga kita menjadi terbiasa untuk merawat dan menjaga lingkungan agar selalu terjaga kebersihannya. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan agar dapat mengurangi volume sampah yang ada yakni kesadaran masyarakat itu sendiri.

*“Waduh mbak, amburadul kalau sudah air meluap. Sampah kemana - mana. Sudah bau amis, dicampur bau sampah jadi satu. Malah pernah adek dan nenek saya sakit bebarengan setelah banjir. Semacam keracunan. Ya mungkin karna waktu itu asal makan, tidak melihat sudah dihinggapi lalat atau tidak.”*  
(Wanita ASN Kelurahan Kampung Mandar)

Selain itu, aspek ekonomi yang merupakan aspek kehidupan sangat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tujuan mensejahterahkan taraf hidup masyarakat. Salah satu dampak yang ditimbulkan akibat adanya suatu kegiatan yakni terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran. Masyarakat di sekitar pantai khususnya dikelurahan kampung mandar, semakin dekat dengan pantai masyarakat semakin merasakan dampak yang terjadi, begitu sebaliknya masyarakat yang jauh dari pantai bisa saja tidak merasakan dampak yang terjadi. Hal yang sering dikeluhkan masyarakat sekitar pesisir pantai yakni, apabila air dari pantai pasang dan terjadi banjir sampah meluap yang akan semakin meresahkan warga.

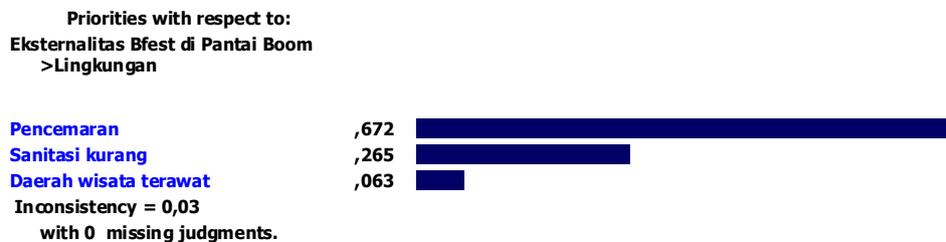
*“Iya dek, alhamdulillah selalu ramai dikunjungi meskipun gerainya tidak luas. Pengunjungnya ya lebih banyak wisatawan asing, karena corak batik khas Banyuwangi*

*yang memiliki arti tersendiri membuat mereka tertarik, kadang juga sisa kembaliannya diberikan ke saya.”*  
*(Penjaga gerai sisik Melik asal Tulungagung,2018)*

Adanya dampak sosial yang ditimbulkan dengan pengembangan pariwisata menyangkut berbagai aspek perubahan diantaranya meningkatkan perkembangan suatu daerah, karena pada umumnya daerah wisata terletak dipantai yang dapat dijadikan sebagai objek wisata. Salah satu keberhasilan industri pariwisata di Kabupaten Banyuwangi adalah meningkatnya popularitas daerah, merubah image daerah dan perubahan gaya hidup masyarakat dapat terlihat pada perilaku masyarakat yang cenderung menjadi konsumtif. Selain itu, Adanya media sosial turut mendongkrak popularitas obyek wisata di Banyuwangi sehingga kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara semakin meningkat.

*“Dulu orang enggan pergi ke Banyuwangi karena tidak ada hal menarik, malah ngerasa takut karena mitosnya santet dimana mana. Orde Baru dulu di bawah rezim Soeharto, masyarakat di Banyuwangi dan sekitarnya, mengalami tragedi kemanusiaan luar biasa yakni terjadi gelombang pembunuhan orang-orang yang diduga sebagai dukun santet. Pembunuhan berantai ini menimbulkan provokasi di kalangan masyarakat bawah. Awalnya pembunuhan dilakukan terhadap para dukun santet oleh orang-orang terlatih namun kemudian merembet ke pembunuhan pengajar. Pokoknya dibatai,, Banyuwangi sepi, ya beberapa tahun terakhir ini mulai adanya banyuwangi festival pemerintahan pak Anas pengunjung lumayan melonjak dan pariwisata banyuwangi mulai dikenal masyarakat.”* (Sekretaris Kelurahan Kampung Madar, 2018)

Berikut gambar bobot prioritas subkriteria lingkungan dapat dilihat pada gambar 1.2 .

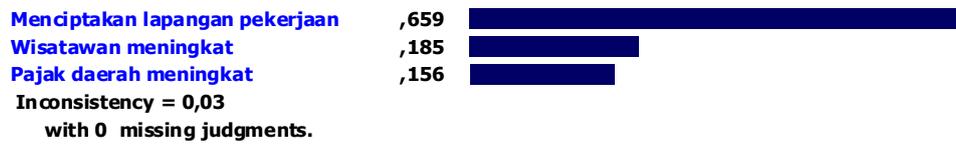


Gambar 1.2 Bobot Prioritas Subkriteria Lingkungan

Dari bobot prioritas subkriteria diatas, Prioritas tertinggi yakni pencemaran sebesar 0,672 kemudian disusul dengan sanitasi kurang sebesar 0,265 dan yang terendah yakni daerah wisata terawat sebesar 0.063. Artinya, rasio inkonsistensi <0,1 berarti survey ini masih dianggap konsisten sehingga tidak perlu dilakukan survey ulang. Ini menunjukkan bahwa adanya pencemaran lingkungan (banyaknya sampah) merupakan hal yang sangat dominan terjadi akibat adanya pariwisata di Pantai Boom.

Gambar bobot prioritas subkriteria ekonomi dapat dilihat pada gambar 6.3 berikut ini.

**Priorities with respect to:  
Eksternalitas Bfest di Pantai Boom  
>Ekonomi**

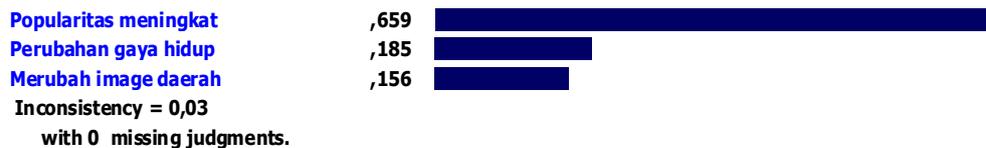


Gambar 1.3 Bobot Prioritas Subkriteria Ekonomi

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa bobot prioritas subkriteria sosial tertinggi yaitu menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 0,659 dan disusul dengan prioritas kedua meningkatnya wisatawan sebesar 0,185 dan terakhir adalah pajak daerah meningkat sebesar 0,156. Dengan inkonsistensi sebesar 0,03. Artinya, rasio inkonsistensi  $<0,1$  berarti survey ini masih dianggap konsisten sehingga tidak perlu dilakukan survey ulang.

Gambar bobot prioritas subkriteria sosial dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut ini.

**Priorities with respect to:  
Eksternalitas Bfest di Pantai Boom  
>Sosial**

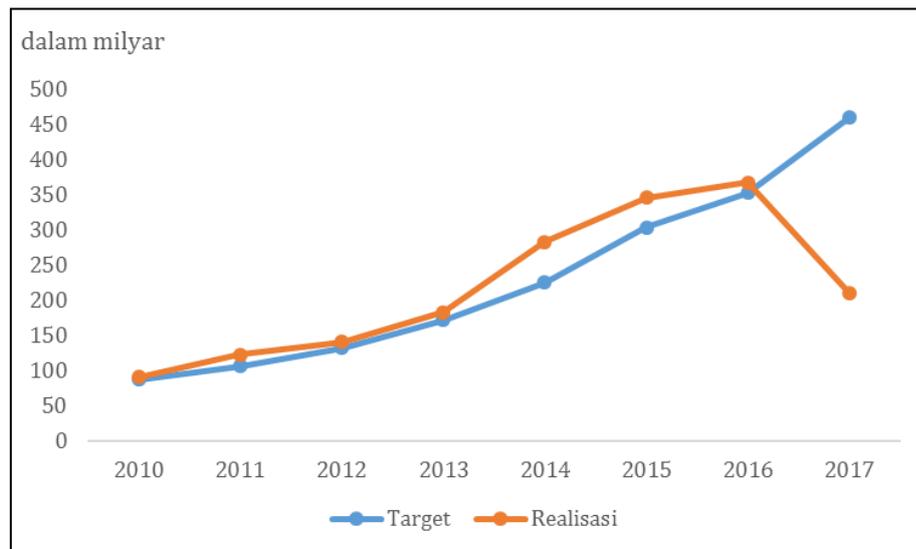


Gambar 1.4 Bobot Prioritas Subkriteria Sosial

Gambar diatas dapat dijelaskan bahwa bobot prioritas subkriteria sosial tertinggi pada popularitas meningkat sebesar 0,659. Kemudian disusul dengan perubahan gaya hidup sebesar 0,185 dan yang terakhir merubah image daerah sebesar 0,156 dengan inkonsistensi sebesar 0,03. Artinya, rasio inkonsistensi  $<0,1$  berarti survey ini masih dianggap konsisten sehingga tidak perlu dilakukan survey ulang. Terkait popularitas daerah, menentukan branding apa yang melekat di sebuah kota, memerlukan kajian secara ilmiah terkait potensi apa yang dimiliki kota tersebut salah satunya potensi pariwisata. Di Kabupaten Banyuwangi selain tempat wisata, kuliner khas Banyuwangi juga diminati berkat banyaknya masyarakat dan pengunjung yang berfoto lalu diunggah ke sosial media sebelum menikmatinya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan media sosial turut mendongkrak popularitas obyek wisata terutama di Pantai Boom dimana keberadaannya yang secara langsung melihat view Pulau Dewata.

Implikasi ekonomi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada grafik pendapatan asli daerah tahun 2010 sampai tahun 2016 naik signifikan. Sebesar 90 milyar di tahun 2012, selanjutnya tahun 2015 sebesar 346 milyar sampai tahun 2016 sebesar 367 milyar. Kenaikan target tersebut mengingat sektor wisata di Kabupaten

Banyuwangi semakin berkembang pesat dan mempunyai potensi daya tarik yang semakin diminati wisatawan untuk berkunjung. Namun mengalami penurunan seperti tampak dalam grafik diatas ditahun 2017 sebesar 210 milyar Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah gencar dalam penggunaan anggaran dan menggali potensi termasuk target pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (Selanjutnya PAD). Berikut grafik target dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi.



Sumber: BPS dalam angka diolah, 2018

Gambar 1.5 Target dan realisasi pendapatan asli daerah

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa kemajuan pariwisata tidak bisa dijadikan tolak ukur naiknya PAD disebabkan karena pariwisata yang dikembangkan di Kabupaten Banyuwangi tidak hanya berdampak terhadap PAD, diantaranya akomodasi wisata lain yang bersama-sama mendongkrak ekonomi masyarakat yang merupakan payung besar pemberdayaan masyarakat lokal di Kabupaten Banyuwangi. Sejalan dengan penelitian Fayissa (2007) yang berjudul *The Impact of Tourism on Economic Growth and Development in Africa*, bahwa pariwisata dan sektor pendukungnya memberi andil dalam meningkatkan *Gross Domestic Product (GDP)* dan pendapatan perkapita, sehingga berdampak pada peningkatan *Human Develoment Index (HDI)* di Negara Sub Sahara Afrika.

Kabupaten Banyuwangi tumbuh menjadi surga pariwisata di Indonesia maupun di dunia. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tahun 2018 salah satu penopang tebesarnya berasal dari sektor pariwisata dengan prediksi tumbuh hingga 8.41 persen. Pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata tersebut didukung sektor penyedia akomodasi, perdagangan, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan berbagai sektor lainnya. Dimana penyelenggaraan

Banyuwangi Festival menjadi sarana yang efektif dalam mempromosikan dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Banyuwangi.

Terjadi peningkatan signifikan pariwisata di Banyuwangi tahun 2017. Jumlah kunjungan wisatawan lokal pada tahun 2014 tercatat 1.363.530 dan pada 2017 menjadi 4.832.999. Sementara kunjungan wisatawan asing dari 30.068 pada 2014 melonjak tajam menjadi 98.970 orang. Peningkatan tersebut dibuktikan dengan lonjakan penumpang pesawat dari 7.826 menjadi 188.949 tahun 2017. Dampak langsung lainnya adalah tumbuhnya ekonomi lokal warga. Wisatawan yang datang tentunya akan membelanjakan uangnya. Momen tersebut dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi di Banyuwangi. Dimana Pemerintah Banyuwangi saat ini berusaha untuk memaksimalkan semua potensi yang dimiliki.

Faktor yang mendukung penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Wisata khususnya di Pantai Boom yakni optimalnya seluruh aktor dan pemerintah mampu menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Dengan keterlibatan seluruh komponen meliputi masyarakat, pemerintah dan swasta memiliki peranan dan fungsinya masing-masing yang sangat dibutuhkan satu sama lain dalam hal pengelolaan wisata. Pengelolaan wisata di Pantai Boom sudah dilakukan oleh ketiga aktor dan sudah melibatkan seluruh komponen yang ada. Disini pihak swasta di Kabupaten Banyuwangi memiliki tanggung jawab besar diantaranya wajib mengutamakan kenyamanan, menyediakan segala kebutuhan wisatawan yang berkunjung muladar tiket, akomodasi, restoran, tempat tinggal dan pemandu wisata. Masyarakat yang merupakan individu menjadi aktor dalam mengembangkan sebuah pariwisata. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) misalnya, di Kabupaten Banyuwangi selalu diberikan ilmu terkait bagaimana menciptakan pelayanan wisata yang baik dengan pentingnya menjaga kebersihan dan ketersedianya toilet bersih di tempat wisata. Selain itu, Adanya pemerintah dalam hal ini kinerja pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah baik. Dibuktikan dengan dibangunnya dermaga yang diberi Marina Boom guna untuk memperlancar aktivitas ekonomi dikalangan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

1. Prioritas akhir dari ketiga aspek kriteria yang terdiri dari ekonomi, lingkungan dan sosial adalah adanya pencemaran lingkungan. Menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih pencemaran lingkungan yang berupa banyaknya sampah untuk di atasi terlebih dahulu karena apabila air laut yang berada di Pantai Boom pasang, maka sampah yang ada meluap sehingga akan meresahkan warga di pesisir pantai terutama di kelurahan kampung Mandar.
2. Adanya eksternalitas lingkungan yang terjadi sebagai manfaat dan biaya yang ditunjukkan oleh perubahan lingkungan secara fisik. Hal yang di perhatikan dalam penelitian ini adalah

*distance* atau jarak karena semakin dekat dengan Pantai Boom, semakin besar eksternalitas positif dan negatif yang dirasakan masyarakat.

3. Pembangunan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat merupakan solusi tepat dalam penanganan lingkungan yang baik dimana ketika masyarakat sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, maka masyarakat akan merasakan manfaat lebih yang dapat diterima dari upaya pelestarian lingkungan.
4. Pembangunan pariwisata yang baik tidak terlepas dari keberhasilan suatu tata kelola yang baik, yang didukung dengan keterlibatan ketiga aktor yakni pemerintah, masyarakat dan swasta yang sangat penting dalam membangun pariwisata berkelanjutan. Dalam praktiknya tata kelola pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah efektif namun belum efisien. Pemerintah belum mampu menekan potensi pencemaran lingkungan yang terjadi sehingga terjadinya eksternalitas negatif pada lingkungan sekitar pantai Boom yakni pencemaran lingkungan akibat banyaknya sampah.

## REFERENSI

- Aall, C. (2014). Sustainable tourism in practice: Promoting or perverting the quest for a sustainable development? *Sustainability* (Switzerland), 6(5), 2562–2583. <https://doi.org/10.3390/su6052562>
- Aronsson, Lars, *The Development of Sustainable Tourism* (London: Continuum, 2000).
- Buckley, R. (2012). Sustainable tourism: Research and reality. *Annals of Tourism Research*, 39(2), 528–546. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.02.003>
- Creswell, J.W. (2014). *Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches: Research Design* (edisi ke-4). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Fisher, R.C. 1996. *State and Local Public Finance*. New York: Irwin.
- Hyman, D.N. 1999. *Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*, sixth edition. New York: The Drisdren Press.
- Kolondam, Helly. 2014. Pengaruh Good Governance terhadap Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kota di Kota Manado. Manado: Unstrat.
- Kurniawati, Rina. 2013. Modul Pariwisata Berkelanjutan. <http://rinakurniawati.files.wordpress.com/2013/01/modul-pariwisata-berkelanjutan.pdf>. diakses tanggal 15 Oktober 2018.
- Mangkoesebroto, Guritno, 2003. *Ekonomi Publik*, Edisi Keempat, Yogyakarta: Penerbit BPFE UGM.
- N.Okech, Roseyne.2011." Promoting Sustainable Festival Events Tourism: A Case study of Lamu Kenya". *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*: vol 3.
- Nurhidayati, S. E. (2007). Community Based Tourism (CBT) sebagai Pendekatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik Universitas Airlangga*, Th XX 3, 191–202. Retrieved from [http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/Community Based Tourism\\_CBT\\_.pdf](http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/Community Based Tourism_CBT_.pdf)
- Ohlan, R. (2017). The relationship between tourism , financial developpt and economic growth in India. *Future Business Journal*, 3(1), 9–22. <https://doi.org/10.1016/j.fbj.2017.01.003>

- Saaty, Thomas L., 1994, How to Make a Decision : The Analytic Hierarchy Process, Institute for Operations Research and the Management Science, no. 6, vol. 24, hal 19-43.
- UNDP. (2007). United Nations Development Programme: Indonesia. 2007, from <http://www.undp.or.id/mdg/index.asp>.
- Vogel, D. (n.d.). E-commerce for Community-Based Tourism in Developing Countries E-Commerce for Community-Based Tourism, (June 2014), 1–23.
- Web, R.B., & Giesne, C. (1992). Teaching qualitative research. Dalam M.D. LeCompte, W.L. Millroy & J.Preissle (Editor), The Handbook of Qualitative research in education (hlm. 771-814). San diego, CA: Academic Press.
- Widodo, J.2001. Good governance : telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah, Surabaya: Insan Cendekia.
- Wykstra, Ronald A. 1971. Education and Economics of Human Capital. New York: The Free Press.